

## Analisis Sosiologis terhadap Sistem Pergantian Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam

Mohammad Syawaludin

Fakultas Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: syawaluddin@radenfatah.ac.id

### **Abstract**

*One task of being a umaro sultan, that he was a religious adviser to the government. The existence of the Sultanate of Palembang is not only the cultural but also the existing political elements. In this study it was found that the process of appointment of kings or sultans who ruled in Palembang no different from those in other sultanates that ever existed on earth this archipelago. Despite having Islamic political unity, but actually still continue what has been there in the past, the concept of Hindu-Buddhism, Islam simply as a shirt while outside. The same is true for aspects of legality. As a maritime empire that is absolute, it seems referrals can be directed only remaining absolute monarchy in Southeast Asia was the Sultanate of Brunei Darussalam. However, the origin of the empire was not of royal birth agrarian civilization as a palace, but of an empire in estuaries and the sea like, the kingdoms in Peninsular Malaysia, Sumatra, Borneo, and others.*

### **Abstract**

*One task of being umaro sultan, that he was a religion adviser to the government. The existence of the Sultanate of Palembang was not only the cultural but also the existing elements of political. In this study it was found that the process of appointment of kings or sultans who ruled in Palembang not different from people of other sultanates that ever existed on this archipelago earth. Despite having Islamic political unity, but actually still continued what had been there in the past, the concept of Hindu-Buddhism, Islam was only as a temporary shirt outside. The same thing was prevail for the aspects of legality. As a maritime empire that was absolute, it seemed directive could be directed only remaining absolute monarchy in Southeast Asia was the Sultanate of Brunei Darussalam. However, the origin of the empire was not born the empire of agrarian civilization as a palace, but from*

*an empire in estuaries and the sea like, the Kingdoms in Peninsular Malaysia, Sumatra, Borneo, and others.*

**Keywords:** *Social Stratification, Sultan, Symbol, Charismatic, the Kingdom*

Dalam mengkaji sistem pengangkatan raja atau sultan tidak dapat dipisahkan dari persoalan institusi sosial dan politik yang hadir di tengah-tengah kekuasaan seperti keturunan, kepercayaan, istana dan lain sebagainya. Kehadiran wujud kekuasaan tradisional dengan sejumlah konsep yang ada dalam kekuasaan itu sendiri, sesuai dengan kebudayaan politik yang dianut dan menentukan suatu proses suksesi raja atau sulthan terjadi di masa itu. Ini penting dianalisis untuk memahami suatu bentuk prosesi kunci dari perjalanan sejarahnya.

Dari berbagai fenomena kekuasaan yang terjadi di seputar suksesi tahta kerajaan yang paling mendasar adalah munculnya dualisme kepemimpinan meskipun juga bukan hal yang aneh, Misalnya Kerajaan Kahuripan dulu juga pecah menjadi dua Daha dan Jenggala, Surakarta pecah menjadi dua Kesunanan dan Mangkunegaran, Yogyakarta menjadi Kesultanan dan Pakualamam. Kraton Cirebon pecah menjadi Kasepuhan dan Kanoman. Kerajaan Solo. Yogya dan Cirebon meskipun pecah menjadi dua, ternyata keduanya tetap eksis hingga sekarang dan keduanya mampu menjadi teladan (budaya) bagi masyarakat sekitar yang mengapresiasinya. Sebab faktor geneologi dan kesinambungan tahta raja atau sulthan tidak satgnan atau menghilang, meskipun oleh pemerintah Kolonial Belanda keberadaan mereka dihapuskan secara statuta pemerintahan.

Seperti kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon secara resmi dihapuskan oleh Kolonial Belanda dengan disahkannya Gemeente Cheirebon (Kota Cirebon), yang mencakup luas 1.100 Hektar, dengan penduduk sekitar 20.000 jiwa (Stlb. 1906 No. 122 dan Stlb. 1926 No. 370). Pada masa kemerdekaan Indonesia, kata Kesulthan diganti dengan kata Keresidenan Cirebon dan tidak lagi merupakan pusat dari pemerintahan dan pengembangan agama Islam. Meskipun demikian kata keraton tetap ada dan menjalankan perannya sebagai pusat kebudayaan masyarakat khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Umumnya, Keraton Kasepuhan sebagai istana Sultan Sepuh dianggap yang paling penting karena merupakan keraton tertua yang berdiri tahun 1529, sedangkan Keraton Kanoman sebagai istana Sultan Anom berdiri tahun 1622, dan yang terkemudian adalah Keraton Kacirebonan dan Keraton Kaprabonan.

Lain halnya dengan kasus yang terjadi di Palembang yakni pengangkatan sulthan baru pada tahun 2003 di era kesultanan Palembang yang sudah dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1923, bahkan sultan terakhir yang berkuasa dibuang ke Batavia. Pengangkatan tersebut menarik karena setelah lebih 200 tahun institusi keraton dan sultannya tidak ada sekarang dimunculkan kembali oleh sekelompok masyarakat Palembang. Pengangkatan R.M.S. Prabu Diraja sebagai Sultan Mahmud Badaruddin III dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2003 (29 Dzulhijjah 1423 H.) di Masjid Lawangkidul. Pengangkatan ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan tersebar luas melalui media masa lokal. Kalangan yang pro dengan pengangkatan itu berpendapat bahwa pengangkatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya Kesultanan Palembang dan sudah memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, kalangan yang tidak sependapat dengan pengangkatan tersebut memberikan alasan dari beberapa aspek, baik dari aspek keabsahan (legalitas) maupun relevansi pengangkatannya di masa kini seperti yang dinyatakan oleh Iskandar Mahmud Badarudin yang didaulat juga sebagai penerus kesulthanan Palembang Darussalam dilantik di Benteng Kuto Besak oleh Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam pada 19 November 2006.

Kasus pengangkatan yang menimbulkan “konflik” di era modern seperti sekarang ini, yang sudah menglobal dengan berbagai multidimensi persoalan dan tantangan yang melampaui batas-batas sejarah, peradaban dan kebudayaan, proses sejarah itu ternyata masih berlanjut. Oleh karena itu dalam membaca setiap peristiwa sejarah tidak harus dimaknai secara sepihak, tetapi harus bersifat dialektis sehingga dapat meminimalkan subyektifitas dan lebih mengedepankan obyektifitas. Hal ini juga berlaku dalam membaca proses suksesi kepemimpinan di masa lalu, saat kesatuan politik masih berbentuk kerajaan atau kesultanan, yang di beberapa daerah di nusantara masih terus berlanjut sampai saat ini. Apalagi jika dilihat bahwa pengangkatan seorang raja (sultan) tidak terlepas dari konsep Negara (kekuasaan), yang tentu saja berbeda dengan konsep negara modern yang diperkenalkan oleh Barat.

Sebab Raja atau Sulthan merupakan tipe kepemimpinan yang menduduki lokasi sosial-historis dengan orientasi nilai yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula reaksinya terhadap eksistensinya apakah berupa penolakan, adaptasi, dan asimilasi. Tidak jarang menghadirkan konflik politik yang disebabkan oleh faktor sosiokultural dengan kepentingan ideologi atau nilai tertentu. Tidak kalah pentingnya analisis struktural yang membahas status dan peranan perbagai elite,

hubungan dan perbandingan kekuasaan antara mereka, kesemuanya dalam kerangka hirarkis suatu sistem feodal.

Struktur kekuasaan sangat menentukan struktur sosial dengan kedudukan birokrasi yang sangat sentral fungsinya. Dalam hubungan ini sangatlah relevan menelaah kehidupan sosial antara golongan sosial, terutama dalam konteks kepentingan, status sosial, ideologi, serta sistem nilai-nilainya. Tidak dapat diabaikan kenyataan bahwa tindakan dan interaksi politik tidak dapat berjalan di luar kerangka kebudayaan politik (*political culture*). Di sini tindakan, kelakuan, serta sikap perlu dilembagakan. Misalnya peranan seorang tokoh ditentukan oleh struktur masyarakat, atau paling tidak peranannya dijalankan dalam batas-batas struktural masyarakat. Pelaku tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari ikatan atau subjektivitas yang demikian.

Inilah yang melatarbelakangi perlunya diadanya penelitian tentang sistem pergantian Sulthan di Kesultanan Palembang yakni adanya keunikan tersendiri berkaitan dengan kebudayaannya, yang merupakan perpaduan antara budaya Melayu dan Jawa. Perbedaan budaya politik dan sistem perekonomian berpengaruh besar terhadap proses suksesi yang terjadi. Budaya Melayu yang lebih menitikberatkan perekonomiannya di bidang maritim, tentunya akan berbeda dengan budaya Jawa yang lebih bersifat agraris.

Untuk lebih memberikan analisis yang multikompleks, pendekatan interpretatif terhadap simbol-simbol politik, strategi politik, hubungan kebudayaan politik, serta adat-istiadat setempat dalam hubungannya dengan kekuasaan raja atau sulthan juga dikemukakan secara ringkas.

### **Pola-pola Pembentukan Tradisi Penggantian Kekuasaan Raja**

Menurut Taufik Abdullah, ada tiga pola dalam proses pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, ketika Samudera Pasai berdiri pada abad ke-13 sampai abad ke-17 ketika kerajaan Gowa-Tallo resmi masuk Islam. *Pertama*, pola Samudera Pasai. Lahirnya Kerajaan Samudera Pasai berlangsung melalui perubahan dari negara yang segmenter, atau mereuah menurut istilah *Bustanus Salatin*, ke negara yang terpusat. Di sini proses Islamisasi sejalan dengan proses pembentukan kerajaan terpusat, yang menggantikan kerajaan segmenter. Sebagaimana halnya sebuah kerajaan baru, Samudera Pasai tidak saja berhadapan dengan golongan-golongan yang yang belum ditundukkan dan diislamkan dari wilayah pedalaman, tetapi juga harus menyelesaikan pertentangan politik serta pertentangan keluarga.<sup>1</sup>

Dalam proses perkembangannya menjadi negara terpusat, Samudera Pasai juga menjadi pusat pengajaran agama. Pola dari negara segmenter menjadi negara terpusat, juga diambil oleh Aceh Darussalam, yang setelah membebaskan diri dari Pidie, kemudian mengalahkan Samudera Pasai pada tahun 1524. Kecenderungan historis yang sama juga diperlihatkan oleh Sulu dan Manguindanao.

*Kedua*, pola Melaka. Baik *Sejarah Melayu* maupun laporan Portugis memperlihatkan bahwa Islamisasi Malaka dimulai setelah para pedagang Islam dan para "mullah" berhasil mengislamkan keluarga kerajaan atau, bisa juga raja mengambil inisiatif untuk menjadikan dirinya penganut Islam. Dengan kata lain, proses Islamisasi berlangsung dalam satu struktur negara yang, seperti dikatakan dalam *Sejarah Melayu*, telah memiliki basis legitimasi geneologis. Pola Islamisasi melalui konversi keraton atau pusat kekuasaan juga dapat ditemukan di kota-kota pelabuhan yang lain. Ternate dan Gowa-Tallo diislamkan oleh masyarakat dagang masing-masing, yang jumlah serta peran politiknya terus berkembang. Tidak seperti di Samudra Pasai, Islamisasi di Malaka, Gowa-Tallo dan sebagainya.<sup>2</sup>

Tidak memberi landasan bagi pembentukan negara. Islam tidak mengubah desa menjadi suatu bentuk baru dari organisasi kekuasaan, seperti umpamanya yang terjadi di Samudra Pasai. Konversi agama dijalankan, tetapi pusat kekuasaan telah ada lebih dulu. Dari perbandingan beberapa tipe Islamisasi dan pembentukannya negara ini, menurut Taufik Abdullah, muncul dua pola yang menonjol. Yang pertama adalah situasi di mana Islam memainkan peranan dalam pembentukan negara. Yang kedua adalah keadaan di mana Islam harus menghadapi masalah akomodasi struktural. Tetapi dalam kedua pola perpindahan agama tersebut, negara, baik yang berupa kadipaten-kadipaten yang terletak di pinggir-pinggir sungai maupun kerajaan maritim yang relatif terpusat, berperan sebagai "jembatan penyebrangan" Islamisasi bagi wilayah sekitarnya.

*Ketiga*, pola Jawa. Di sini Islam tampaknya tidak punya kebebasan untuk memformulasikan struktur dan sistem kekuasaan, sebagaimana di Pasai. Soalnya jelas: Islam sudah harus berhadapan dengan sistem politik dan kekuasaan yang sudah lama mapan, dengan pusatnya keraton Majapahit. Benar, komunitas pedagang muslim sudah mendapat tempat di pusat-pusat politik pada abad ke-11 dan kemudian membesar pada abad ke-14. Baru pada abad tersebut komunitas itu menjadi ancaman yang serius bagi keraton pusat. Ini pun setelah Majapahit melemah, menyusul konflik internal keluarga kerajaan dan berbagai pemberontakan lokal.

Bahkan Fachry Ali<sup>3</sup> berpendapat bahwa kenyataan tersebut bukan merupakan sesuatu yang asing bagi Islam. Sejak awal kelahirannya, Islam telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan alternatif yang mampu mengubah setiap bentuk tatanan kehidupan yang tidak sesuai dengan harkat kemanusiaan dan diktum-diktum universal. Kondisi tersebut didorong juga oleh penyebaran Islam yang massif di Nusantara, diikuti munculnya kerajaan-kerajaan baru bercorak Islam pada abad 13, ternyata menciptakan momentum baru bagi hubungan-hubungan social, politik, agama antara Timur Tengah dan Nusantara. Bahkan manakalah Malaka jatuh ke tangan Portugis (1511), posisinya digantikan Aceh yang mengambil inisiatif bersama kerajaan Islam lainnya seperti Demak untuk menghadapi kekuasaan Portugis di perairan selat Malaka.

Kerajaan Majapahit melemah, menyusul konflik internal keluarga kerajaan dan berbagai pemberontakan lokal. Situasi yang runyam di pusat keraton itulah, yang membuka peluang kepada para saudagar kaya di berbagai kadipaten di wilayah pesisir untuk menjauh dari kekuasaan raja. Berbekal keuntungan besar dari perdagangan internasional, para pedagang besar itu tidak saja masuk Islam, tapi juga membangun komunitas-komunitas politik yang independen.

Maka begitulah, kita kemudian mengenal Demak, Jepara, Rembang, Tuban, Gresik dan Surabaya, tampil sebagai pusat-pusat perdagangan, aktivitas agama dan politik. Sesudah keraton pusat menjadi goyah, maka keraton-keraton kecil mulai bersaing untuk menggantikan keraton pusat--dan Demaklah akhirnya yang menggantikan. Kerajaan ini, dengan posisinya barunya itu, tidak saja memegang hegemoni politik, tetapi juga menjadi "jembatan penyeberangan" Islam yang paling penting di Jawa. Walaupun mencapai keberhasilan politik dengan cepat dan mainkan peran sebagai "jembatan penyeberangan" keagamaan paling penting, Demak tidak mempunyai kebebasan struktural. Sebagai pengganti keraton pusat, Majapahit, Demak tidak saja harus menghadapi masalah legitimasi politik, tetapi juga panggilan kultural untuk kotinuitas. Dilema kultural dari dominasi politik Islam di dalam suasana tradisi Ciwa-Budhistik, dengan konsep kesusastaan yang konsentrik, telah jauh menukik ke dalam kesadaran, menjadi lebih jelas setelah keraton dipindahkan oleh anak angkat Sultan Trenggana, Jaka Tingkir, ke Pajang di pedalaman.

Menurut Taufik Abdullah, dilema ini menjadi lebih penting dengan muncul dan tampilnya Mataram sebagai pemegang hegemoni (1588). Masih menurut pandangannya bahwa tidak seperti pola Samudra Pasai, di mana Islam

mendorong pembentukan negara yang supra-desa, juga tidak seperti pola Malaka, di mana keraton di-islamkan, di Jawa, Islam tampil sebagai penantang, untuk kemudian menggantikan kekuasaan yang ada. Ini adalah dilema kultural dari orang baru dalam sebuah bangunan politik lama.

### **Sejarah Sultan Kesultanan Palembang Darussalam**

Pada tahun 1659, di Palembang juga berdiri sebuah kesultanan yang memiliki corak tersendiri dan berbeda dengan Kerajaan Palembang sebelumnya, yaitu Kesultanan Palembang Darussalam. Pendiri kesultanan ini adalah Sultan Jamaluddin atau dikenal dengan sebutan Sultan Ratu Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayidul Iman, yang pada masa akhir hayatnya bergelar Sunan Cinde Walang. Kesultanan Palembang Darussalam berdiri selama hampir dua abad, yaitu sejak tahun 1659 hingga tahun 1825. Sebelum kesultanan ini berdiri sebenarnya telah ada terlebih dahulu Kerajaan Palembang yang merupakan cikal bakal berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam.

Bedanya dengan Kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam lebih bercorak Islam karena menerapkan syariat Islam serta menjadikan al-Qur'an dan hadits sebagai konstitusi pemerintahan. Sultan Ratu Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayidul Iman atau disebut dengan Sunan Cinde Walang adalah raja pertama di Kesultanan Palembang Darussalam. Ia memerintah selama 45 tahun.

Dengan masa kekuasaan yang begitu panjang, ia telah meletakkan tata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang kuat di kesultanan ini. Dalam bidang pemerintahan, ia menerapkan sistem perwakilan di daerah pedalaman atau dikenal dengan istilah *raban* dan *jenang*. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibuatnya dituangkan dalam bentuk *piagem* (piagam), yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah yang masuk dalam pengaruh kekuasaan Palembang, seperti Bangka, Belitung, sebagian Jambi (Muara Tembesi), Bengkulu (Kepahiang/Rejang), dan Lapung (Tulang Bawang/Mesuji).

Sunan Cinde Walang pernah melakukan aliansi internasional antara Palembang, Jambi, dan Johor. Aliansi ini hanya bersifat insidental dan situasional. Namun, aliansi ini kadang justru menimbulkan konflik di antara mereka sendiri karena adanya perbedaan kepentingan. Dalam bidang pertanian, ia mewajibkan bagi daerah-daerah tertentu untuk mengembangkan tanaman lada. Ia juga membuat sistem perairan yang dibuat antara Ogan, Komering, dan Mesuji, yang tidak saja digunakan untuk pertanian, namun juga untuk kepentingan pertahanan. Setelah Sunan Cinde Walang meninggal pada tahun 1706, tahta kekuasaan

kesultanan kemudian dipegang oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (1706-1714).

Ia merupakan sultan yang dikenal gagah berani dan banyak menyelesaikan permasalahan dengan senjata. Akibatnya, Kesultanan Palembang pernah kehilangan salah satu daerah kekuasaannya, yaitu Muara Tembesi di Jambi. Ketika Jayo Ing Lago tidak lagi berkuasa, terjadi kemelut politik pada saat itu perihal siapa yang pantas menggantikannya. Pangeran Purbaya, yang seharusnya menggantikan Jayo Ing Lago meninggal karena diracun. Tahta kekuasaan kemudian dipegang adik Jayo Ing Lago, Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno (1714-1724). Putra-putra Jayo Ing Lago, yaitu Raden Lembu dan Pangeran Mangkubumi Mohamad Ali menolak keputusan tersebut dengan melakukan pemberontakan. Sultan Agung Komaruddin kemudian berinisiatif untuk berdamai dengan kedua keponakannya tersebut dengan cara mengangkat Pangeran Mangkubumi Mohamad Ali sebagai Sultan Anom Muhamad Alimudin dan Raden Lembu sebagai Pangeran Jayo Wirakmo.

Namun tetap saja keputusan tersebut belum dapat memuaskan kedua belah pihak karena ternyata Pangeran Jayo Wikramo lebih diuntungkan dengan mendapatkan putri Sultan Agung Komaruddin sebagai pasangannya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya konflik antar saudara. Pangeran Jayo Wirakmo memenangkan peperangan tersebut yang mengantarkan dirinya sebagai sultan dengan gelar Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (1724-1758). Bila Dilihat dari sisi periode pemerintahan yang berkuasa di Palembang pada masa tersebut, paling tidak dapat dibedakan dari garis silsilah pemegang kekuasaan yakni; periode Kerajaan Palembang (sebagai cikal bakal Kesultanan Palembang) dan periode Kesultanan Palembang Darussalam itu sendiri.<sup>4</sup>

### **Sejarah Suksesi Raja dan Sultan Palembang Darussalam**

Retno<sup>5</sup> menyatakan bahwa sistem penggantian raja-raja yang ada di Indonesia tampaknya sudah dibakukan sedemikian rupa dalam bentuk tradisi dan adat masing-masing. Meskipun demikian, sejarah juga mencatat seringnya terjadi konflik di antara para elit kerajaan pada saat proses penggantian raja. Apalagi jika raja yang memerintah sebelumnya tidak menunjuk calon penggantinya atau belum mengangkat putra mahkota. Intrik di antara para pangeran seringkali mewarnai proses penggantian raja, yang tidak jarang berbuntut pada kematian pada kematian salah satu diantaranya. Hal seperti itu juga berlaku untuk kerajaan atau Kesultanan Palembang Darussalam. Untuk menyelusuri proses penggantian raja-raja dan

sultan di Palembang dapat dilihat dalam buku “Het Sultanaat Palembang” yang disusun oleh Woelders berdasarkan beberapa naskah yang disimpan di Leiden Belanda. Naskah tersebut diberi Kode Teks UBL 4 - 7, TR-1, TR- 3 dan Teks KI-4.<sup>6</sup>

Susunan raja-raja dan para sultan yang memerintah di Palembang juga termuat pada tabel 1 yang disusun oleh Husni Rahim dengan mengacu pada berbagai sumber.<sup>7</sup> Dari susunan tersebut terlihat adanya perbedaan, karena tabel yang dibuat oleh Husni Rahim dirunut mulai dari Aria Dilah, sementara yang lainnya dimulai dari Ki Gede Ing Suro. Namun dari naskah-naskah lama yang disusun oleh Woelders tampak juga adanya perbedaan, utamanya dalam masa kekuasaan para raja dan sultan saat memerintah. Meskipun demikian, naskah-naskah itu semuanya mencantumkan nama Ki Gede Ing Sura sebagai penguasa pertama di Palembang. Meskipun sebagai cikal bakal genealogi tidak selalu sama. Teks UBL – 6 (*Kitab Toeroenan Radja-radja di dalam negeri Palembang*), misalnya menyebutkan bahwa genealogi raja-raja Palembang dimulai dari Sayyidina Husin.

Perbedaan lama kekuasaan atau tahun masa kekuasaan para raja dan sultan yang memerintah, tentunya dapat dikaitkan dengan masa penulisan naskah-naskah tersebut yang semuanya berasal dari setelah kesultanan Palembang dihapuskan. Teks UBL 4- 6 ditulis pada tahun 1851; sementara teks UBL – 7 ditulis antara tahun 1863 – 1880.<sup>8</sup> Mengenai proses penggantian kekuasaan di Palembang sejak masa pemerintahan Ki Gede Ing Suro sampai dihapuskannya Kesultanan Palembang Darussalam oleh pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1823. Dalam naskah-naskah kuna Palembang yang terangkum dalam buku “Het Sultanaat Palembang” dan tradisi lisan masyarakat Palembang diketahui bahwa yang berkuasa di Palembang pertama kali ialah Ki Gede Ing Sura Tua. Menurut kajian Graff dan Pigeaud, Ki Gede Ing Sura Tua dianggap sebagai raja pertama dan berkuasa sejak tahun 1547 sampai 1552. Ki Gede Ing Sura Tua merupakan salah satu pelarian dari Jipang yang kemudian memegang pemerintahan di Palembang pada tahun 1541.

Angka tahun ini diperoleh Graff dan Pigeaud berdasarkan catatan de Kock.<sup>9</sup> Hal ini berbeda dengan catatan Sturler yang menyebut angka tahun 1549 sebagai angka tahun kedatangan Ki Gede Ing Sura Tua di Palembang (Sturler, 1843). Angka tahun ini ternyata disetujui oleh Graff dan Pigeaud, karena pada tahun 1541 Sultan Trenggono masih berkuasa di Demak. Terlepas dari perbedaan angka tahun kedatangan Ki Gede Ing Sura tersebut, yang jelas tokoh ini tidak

pernah dimakamkan di Palembang, karena ia meninggal saat dalam pelayaran kembali ke Jawa. Menurut Husni Rahim masa kekuasaan Ki Gede Ing Suro 21 tahun. Husni Rahim juga menyebutkan bahwa sebelum Ki Gede Ing Sura pernah berkuasa Pangeran Sido Ing Lautan yang masa kekuasaannya berlangsung selama 5 tahun. Sementara menurut teks TR. 1 masa kekuasaannya adalah 22 tahun.

Jika melihat masa kekuasaannya yang lama, maka dapat disimpulkan bahwa pada masa itu kondisi Palembang stabil. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan jika sebelum kembali ke Jawa, dia sudah memberi mandat kepada saudaranya, Ki Gede Ing Sura Muda untuk melaksanakan pemerintahan di Palembang. Tokoh ini memerintah Palembang sejak tahun 1572 – 1589 atau selama 17 tahun. Angka tahun yang disebutkan oleh Husni Rahim ini ternyata berbeda dengan yang terdapat dalam teks TR. 1. karena menyebutkan masa kekuasaannya hanya satu tahun, yaitu mulai tahun 968 Hijriah. Ki Gede Ing Sura Muda inilah kemungkinan yang membangun kompleks pemakaman di Gedingsuro. Tokoh ini juga dikenal dengan sebutan Ki Gede Ing Suro Ilir atau Kyai Mas Anom Adipati Ing Suro. Jika Ki Gede Ing Suro Ilir baru diganti pada tahun 977 Hijriah, maka seharusnya masa kekuasaannya sekitar 9 tahun, bukannya satu tahun. Perbedaan lama kekuasaan Kemas Depati yang disusun oleh Husni Rahim dan TR. 1 adalah 7 tahun.

Masa kekuasaan antara 9 – 17 tahun tidak dapat dikatakan singkat, karenanya Ki Gede Ing Suro Ilir kemudian menyerahkan kekuasaan kepada anaknya yaitu Pangeran Kemas Dipati (1589-1594), sehingga lama kekuasaannya hanya lima tahun. Angka tahun ini ternyata juga mengalami perbedaan dengan yang tercantum pada teks TR. 1., karena menyebutkan angka tahun 977 Hijriah sebagai awal masa pemerintahannya dan baru diganti tahun 989 Hijriah atau berkuasa selama 12 tahun. Terlepas dari perbedaan masa kekuasaan tersebut, yang jelas pada tahun 1595 kekuasaan berpindah tangan kepada saudaranya yaitu Pangeran Madi Angsoka (anak Ki Gede Ing Suro Mudo) yang memerintah sekitar tahun 1594-1627 atau sekitar 34 –35 tahun. Meskipun pada masa Pangeran Madi Angsoka ini terjadi perang “kafir” dengan Bantam. Lamanya masa pemerintahan Madi Angsoka (34-35 tahun) menunjukkan kondisi perekonomian dan perpolitikan di masa itu yang relatif stabil dan aman.

Ketika Pangeran Madi Angsoka wafat terjadi perebutan kekuasaan antara menantu (Pangeran Jambi) dengan dua paman isterinya (saudara Pangeran Madi Angsoka) dan kemenangan di pihak paman. Meskipun demikian yang menjadi raja adalah Pangeran Madi Alit (anak Ki Gede Ing Suro Mudo) yang disebut Raja

Depati (1629-1630). Pangeran Madi Alit hanya berkuasa selama satu tahun dan beliau mati terbunuh karena perkara wanita.<sup>10</sup> Pangeran Madi Alit kemudian digantikan oleh saudaranya Pangeran Seding Puro atau juga disebut Pangeran Made Sokan yang dikenal dengan Raden Aria yang merupakan anak Kyai Mas Adipati dan memerintah sekitar tahun 1629-1636. Masa kekuasaan Raden Aria yang hanya tujuh tahun terhitung singkat, tapi mengingat sebutannya Pangeran Seding Puro (artinya meninggal di Pura atau kraton), maka kematiannya kemungkinan disebabkan karena sakit yang telah lama diderita selama masa pemerintahannya, oleh karena itu ada kemungkinan sebelum wafat masih sempat meninggalkan wasiat dan menunjuk seseorang untuk pengganti dirinya sebagai penguasa di kerajaan Palembang.

Raden Aria kemudian diganti oleh saudaranya Pangeran Seding Kenayan yang memerintah sekitar 1636-1652. Isteri Pangeran Seding Kenayan adalah Ratu Sinuhun yang sangat terkenal di masyarakat Palembang. Pada masa pemerintahan Pangeran Seding Kenayan ini sempat terjadi ketegangan dengan pihak Belanda di Batavia berkaitan dengan pelanggaran kontrak yang dilakukannya pada tanggal 20 Oktober 1642 yang menguntungkan pihak Belanda. Pangeran Sedo Ing Kenayan tidak memenuhi isi kontrak dan menaikkan harga lada pada tahun 1647, sehingga Belanda tidak memperoleh keuntungan dari monopolinya.<sup>11</sup> Meskipun terjadi “ketegangan” dengan Belanda tampaknya kondisi keamanan dan politik waktu itu tidak berpengaruh banyak dan relatif stabil, sehingga dapat memerintah selama kurun waktu 16 tahun. Pada masa pemerintahan inilah “lahir” *Undang-Undang Simbur Cahaya*, yang oleh masyarakat Palembang diyakini merupakan hasil karya Ratu Sinuhun (istri Pangeran Sido Ing Kenayan). Kestabilan masa pemerintahan Seding Kenayan juga didukung fakta bahwa dia diganti setelah meninggal.

Setelah Pangeran Seding Kenayan wafat ia digantikan oleh kemenakan Ratu Sinuhun yaitu Pangeran Seding Pesariyan (1652-1653) yang kemudian digantikan oleh anaknya Pangeran Seding Rajak (1653-1660). Jika melihat dari julukannya Pangeran Seding Pesariyan (artinya Pengeran yang meninggal di Pesariyan=tempat tidur), maka masa kekuasaan yang singkat tersebut diduga disebabkan karena raja ini meninggal secara mendadak. Langkah Pangeran Sedo Ing Kenayan yang berani melawan Belanda ternyata juga diikuti oleh penerusnya yaitu Pangeran Seding Rajak yang pada tahun 1657 menangkap dua buah kapal Belanda di perairan Sungai Musi.<sup>12</sup> Karena sikap Palembang yang melawan itulah, akhirnya Belanda menyerang dan membakar kraton Kuto Gawang pada tahun

1659, sehingga Pangeran Seding Rajak mengundurkan diri ke Inderalaya dan meninggal dunia di sana. Pangeran Seding Rajak dimakamkan di dusun Sakatiga, Kabupaten Ogan Ilir. Kedudukannya digantikan oleh Raden Tumenggung atau Ki Mas Endi Ario Kesumo yang kemudian dikenal dengan Sultan Abdurrahman atau Sultan Abdul Hamal/Jamal dan lebih dikenal dengan Susuhunan Cinde Walang.

Di masa ini pula Palembang melepaskan diri dari Mataram dan menyatakan berdiri sendiri. Ki Mas Endi menggunakan gelar sultan yang lengkapnya menjadi Sultan Abdurrahman *Khalifatul Mukminin Sayidul Imam*. Sebagai sultan pertama Palembang ia telah mendirikan kraton baru di Beringinjanggut dan kompleks pemakaman Cinde Walang. Pengangkatan ini disertai dengan penandatanganan kontrak perjanjian antara Palembang dan Belanda pada tahun 1662. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda diijinkan kembali untuk mendirikan loji dan gudang di tempat yang strategis dan dekat sungai. Loji tersebut dikenal dengan *Loji Sungai Aur* dan letaknya berhadapan dengan Istana Beringinjanggut.

Setelah Sultan Abdurrahman yang berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam adalah Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago yang memerintah pada tahun 1706-1714. Pada tahun 1709 ia menobatkan putera sulungnya yaitu Raden Abubakar sebagai putera mahkota dengan gelar Pangeran Ratu Purboyo. Meskipun demikian, putera mahkota ini tidak sempat menjadi raja karena wafat. Oleh karena itu kemudian adiknya Raden Uju, sebagai penggantinya dan dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Ratu. Raden Uju kemudian dinobatkan sebagai sultan ketiga di Palembang dengan gelar Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno yang memerintah antara tahun 1714 sampai tahun 1724 (10 tahun).

Tampaknya proses penggantian ini tidak bisa diterima oleh para elit kraton lainnya, yang ditandai dengan adanya perselisihan antara Pangeran Mangkubumi Muhammad Ali dengan adiknya Raden Lambu Pangeran Mangkubumi Jayowikramo tentang siapa yang lebih berhak menjadi sultan. Atas permintaan Sultan Komaruddin, Belanda mengirimkan suatu ekspedisi ke Palembang di bawah pimpinan Willem Daams. Ekspedisi ini berhasil mengusir pangeran Mangkubumi dan memperkuat kedudukan Raden Lambu sebagai calon pengganti sultan.

Dua tahun setelah penandatanganan kontrak tersebut, Raden Lambu Pangeran Mangkubumi Jayowikramo diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin Jayowikramo atau Sultan Mahmud Badaruddin I. Masa

pemerintahannya berlangsung mulai tahun 1724 sampai tahun 1758. Pada tanggal 10 September 1755 terjadi pembaharuan kontrak 2 Juni 1722, yang ditandatangani oleh Paravicini dan Sultan Mahmud Badaruddin Jayowikramo. Dengan terjadinya perjanjian tersebut berimbas pada kestabilan politik pada masa pemerintahannya sehingga dapat mencapai 34 tahun. Hal ini ditandai dengan dibangunnya kraton Kuto Batu (Kraton Kuto Lamo).

Pada tahun 1758 kekuasaan berpindah kepada anak sulungnya yaitu Pangeran Adi Kesumo, setelah menjadi sultan bergelar Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo yang berkuasa dari tahun 1758 – 1776. Seperti pendahulunya, pada masa inipun terjadi pembaruan kontrak dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 1763. Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo kemudian digantikan oleh putra sulungnya dengan gelar Sultan Muhammad Bahauddin (1776 – 1803). Pada masa pemerintahannya dilakukan penobatan putra sulungnya Raden Hasan sebagai putra mahkota, pewaris tahta kesultanan, bergelar Raden Hasan Pangeran Ratu. Sultan Muhammad Bahauddin membangun Kuto Besar yang dilengkapi dengan taman dan rumah dan kemudian menempatnya pada hari Senin tanggal 23 bulan Sya'ban tahun 1211 Hijriah (21 Februari 1797 Masehi). Pangeran Ratu kemudian menempati Kuto Lamo yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo.

Menurut buku yang disusun oleh Badan Pengembangan Pariwisata Daerah Kotamadya Palembang pada tahun 1984, yang berjudul “ Sultan Mahmud Badaruddin II” disebutkan bahwa menurut ketentuan yang berlaku maka putra sulung dari seorang raja adalah putra mahkota dan merupakan pewaris tahta yang sah. Meskipun demikian, penetapannya sebagai sultan tetap harus mendapat persetujuan dari hasil musyawarah yang terdiri dari para pembesar istana dan para alim ulama. Berdasarkan musyawarah tersebut pada April tahun 1804 Raden Hasan Pangeran Ratu dinobatkan menjadi sultan dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin II; sementara Sultan Muhammad Bahauddin bergelar Susuhunan Muhammad Bahauddin. Dari naskah kuna diketahui bahwa sultan berkedudukan di Kraton Lama atau Kraton Kuto Batu, sementara Susuhunan berkedudukan di Benteng Kuta Anyar atau Benteng Kuto Besar.

Pada saat yang bersamaan adik Raden Hasan Pangeran Ratu, yakni Raden Husin Pangeran Adi Menggalo diangkat menjadi Pangeran Adipati Negara sebagai pelaksana harian pemerintahan. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II terjadi pembumihangusan loji Belanda di Sungai Aur pada tanggal 14 September 1811, yang dikenal dengan *Peristiwa Sungai Aur*. Peristiwa ini

menandai kemerdekaan Palembang yang telah lama di bawah kekuasaan Belanda. Namun tidak lama setelah itu, yakni pada tanggal 20 Maret 1812 Gubernur Jenderal Raffles mengirim ekspedisi militer ke Palembang, kemudian menyerang Palembang dan berhasil mendudukinya, sehingga Sultan Mahmud Badaruddin II mengundurkan diri ke Muara Rawas setelah menyerahkan pimpinan pemerintahan kepada adiknya Pangeran Adipati Menggalo Husin Diauddin dan memerintahkan untuk tetap berada di Palembang.<sup>13</sup> Raden Muhammad Husin Diauddin diangkat menjadi sultan oleh Inggris dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin II (1912-1813).<sup>14</sup> Pengangkatan itu dimaksudkan untuk mengadu domba antara kakak dan adik.

Belanda mengangkat kembali Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai sultan pada tanggal 13 Juli 1813 sampai 14 Agustus 1813 (sekitar satu bulan). Pada tanggal 14 Agustus 1813 sampai 23 Juni 1818 Inggris menurunkan Sultan Mahmud Badaruddin II dan mengangkat Sultan Ahmad Najamuddin II sebagai penguasa Palembang. Di sisi lain pernah juga terjadi kedua kakak beradik ini memerintah bersama sama, yaitu antara 23 Juni 1818 sampai 30 Oktober 1818. Sultan Ahmad Najamuddin II berkuasa di Kraton Kuto Lamo sebagai sultan muda; sementara Sultan Mahmud Badaruddin II berkuasa di Benteng Kuto Besar sebagai sultan tuo.

Pada masa kekuasaannya kali ini, yaitu pada tahun 1819 Sultan Mahmud Badaruddin II menobatkan anaknya Pangeran Ratu sebagai sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu (Sultan Ahmad Najamuddin III). Pada saat yang bersamaan Sultan Mahmud Badaruddin II bergelar Susuhunan Mahmud Badaruddin. Pada tanggal 1 Juli 1821 keraton diduduki oleh Belanda dan tanggal 3 Juli 1821 Susuhunan Mahmud Badaruddin dan Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu ditangkap dan dibuang ke Ternate. Tanggal 26 November 1852 Susuhunan Mahmud Badaruddin wafat, sedangkan Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu wafat tahun 1860.

Untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Palembang, Belanda memanggil kembali Sultan Ahmad Najamuddin II dan anaknya dari pengasingannya di Cianjur. Pada tanggal 16 Juli 1821 – 19 September 1825 Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom, anak Sultan Ahmad Najamuddin II diangkat menjadi sultan Palembang oleh Belanda, sedangkan Sultan Ahmad Najamuddin II bergelar Susuhunan Husin Diauddin. Pada tanggal 22 November 1824 Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom dengan sepengetahuan ayahnya memberontak terhadap Belanda, yang menyebabkan ditangkapnya Susuhunan Husin Diauddin dan

dibuang ke Batavia dan meninggal pada tanggal 22 Februari 1825. Sementara Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom baru berhasil ditangkap oleh Belanda pada tanggal 15 Oktober 1825 dan tanggal 19 Oktober 1825 dibuang ke Banda dan lalu ke Menado dan wafat di sana pada tahun 1844. Sebagai akhir dari Kesultanan Palembang adalah dengan dihapuskannya kesultanan dan diserahkan pemerintahannya atas Negeri Palembang dan rakyat Palembang ke tangan Belanda. Penyerahan kekuasaan tersebut dapat dibaca dalam maklumat penyerahan kekuasaan Sultan Palembang kepada pemerintah Belanda.<sup>15</sup>

Menurut Husni Rahim penghapusan Kesultanan Palembang terjadi sekitar tanggal 18 Agustus 1823, yaitu tanggal penandatanganan maklumat perjanjian penyerahan kekuasaan sekaligus penghapusan Kesultanan Palembang (*Ibid.*) Di Nusantara umumnya entitas atau masyarakat politik (*political entity*) disebut kerajaan. A.C. Milner menyebutnya sebagai "kondisi memiliki seorang raja". Entitas politik Islam ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari entitas politik pada masa pra-Islam, di mana raja mempunyai kedudukan yang sangat penting dan sering dipandang sebagai *bodhisattva* alias pribadi yang tercerahkan.

Dan kedatangan Islam tampaknya tidak mengubah esensi entitas politik tersebut, khususnya mengenai raja dan kerajaan, karena konsepsi konsepsi di sekitar soal ini tidak dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan telah mendapatkan legitimasi dari para ulama sendiri. Sebagai akhir dari Kesultanan Palembang adalah dengan dihapuskannya kesultanan dan diserahkan pemerintahannya atas Negeri Palembang dan rakyat Palembang ke tangan Belanda.

Dari paparan tersebut dan data sejarah mengenai para raja dan sultan yang pernah memerintah di Palembang Darussalam dapat diketahui bahwa tidak ada aturan atau hukum yang baku tentang proses penggantian atau pewarisan tahta pada masa Kerajaan Palembang. Dengan kondisi seperti ini rawan terjadinya konflik, karena masing-masing tokoh merasa berhak atas tahta kerajaan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika terlihat adanya ketidakaturan garis keturunan dalam hal pewarisan kekuasaan. Sehingga muncul saudara-saudara muda atau bahkan adik dari pihak permaisuri bisa menduduki tahta kerajaan atau kesultanan. Hal ini terlihat dari proses suksesi dari masa pemerintahan Ki Gede Ing Sura Tua sampai Pangeran Sedo Ing Kenayan, yaitu sejak tahun 1552 – 1652. Selama kurun waktu 100 tahun telah terjadi pergantian kekuasaan di Palembang 10 kali. Dari sepuluh raja tersebut, hanya empat orang raja yang berkuasa lebih dari sepuluh tahun, yaitu Ki Gede Ing Sura Tua 26 tahun; Ki Gede Ing Sura Muda 17 tahun;

Pangeran Madi Ing Angsoka 34 tahun dan Pangeran Sedo Ing Kenayan 11 tahun, selebihnya berkuasa kurang dari sepuluh tahun.

Bahkan ada dua orang raja yang berkuasa hanya sekitar satu tahun, yaitu Pangeran Madi Alit dan Pangeran Sedo Ing Kenayan. Selain raja-raja tersebut, Kyai Mas Adipati hanya berkuasa selama 5 tahun; Pangeran Sido Ing Puro 9 tahun; dan Pangeran Sedo Ing Rajek 7 tahun. Konflik intern para elit kesultanan Palembang ini juga dipicu oleh persaingan antara saudara seayah lain ibu untuk memperebutkan kekuasaan. Isteri para raja yang lebih dari satu merupakan salah satu pemicu timbulnya konflik intern di kalangan keluarga raja Palembang.<sup>16</sup>

Keadaan ini baru dapat teratasi sejak Kyai Mas Hindi atau Pangeran Ario Kesumo Abdurrohim memplotkan pembentukan Kesultanan Palembang dan terlepas dari Mataram. Hal ini tampak dari penunjukkan putra mahkota, yang tidak lain adalah anak pertama sultan dengan permaisuri. Putra mahkota ini diberi gelar Pangeran Ratu Meskipun aturan tertulis mengenai hak pewarisan tahta sebelum Sultan Mahmud Badaruddin II belum diketahui sumber tekstualnya. Namun dari naskah-naskah lama Palembang dapat diketahui bahwa sebelum sultan yang berkuasa meninggal atau turun tahta, dia telah mengangkat seorang putra mahkota dengan gelar Pangeran Ratu. Penobatan sebagai putera mahkota tersebut, bahkan sering juga dilanjutkan dengan penobatan yang bersangkutan sebagai sultan baru lengkap dengan gelarnya.

Sementara itu, sultan yang lama masih tetap memerintah, tetapi kemudian mengambil gelar “Susuhunan”. Walaupun sultan baru sudah diangkat, tidak berarti “sultan lama” yang bergelar susuhunan langsung “lengser keprabon” atau turun dari tahta. Sehingga tidak memegang kendali pemerintahan lagi. Berdasarkan sumber tekstual, ternyata yang terjadi justru sebaliknya, Susuhunan tetap berkuasa penuh berdampingan dengan sultan yang baru saja dinobatkan.

Hal ini juga diperkuat dengan stempel kesultanan Palembang peninggalan Sultan Mahmud Badaruddin II yang berangka tahun 1819 Masehi (1234 H). Pada saat mengeluarkan stempel Sultan Mahmud Badaruddin II sudah meletakkan tahtanya dan menobatkan anaknya Pangeran Ratu sebagai sultan dengan gelar sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu. Setelah menobatkan anaknya Sultan Mahmud Badaruddin II kemudian mengambil gelar susuhunan, seperti yang tertera pada stempel.<sup>17</sup>

Di sini justru tampak adanya proses “pembelajaran” bagi pejabat sultan baru dalam soal “kepemimpinan” ataupun pemerintahan sebelum susuhunan melepaskan diri secara penuh sebagai penguasa kesultanan. Atau dalam istilah

mutakhir “kaderisasi”. Bukan itu saja, dari sumber tekstual juga diperoleh informasi, bahwa sejak digunakannya Benteng Kuto Besak, maka Putera Mahkota menempati Benteng Kuto Lama, sementara sultan lama atau susuhunan tinggal di Benteng Kuto Besak. Ternyata, perbedaan lokasi bermukim dan masih tetap berkuasanya susuhunan, pada masa kemudian justru dimanfaatkan oleh pihak Belanda dan Inggris untuk lebih memperkeruh proses pengambilalihan kekuasaan (suksesi) di lingkungan kraton Kesultanan Palembang dengan cara mengadu domba di antara keduanya. Usaha ini berhasil baik sehingga dalam masa sebelas tahun, Inggris dan Belanda berhasil mengangkat dan menurunkan kedua adik kakak tersebut sebanyak 6 kali sampai dengan dihapuskannya kesultanan Palembang.

Proses penggantian raja di Palembang baru ditemukan rujukannya pada salah satu naskah kuna “Hikayat Palembang” (Teks UBL 7) yang sekarang tersimpan di Museum Leiden, Belanda menyebutkan tentang proses pengangkatan seorang raja sebagai berikut:

*“Adapun cerita dari segala raja-raja yang memerintah diatas tahta kerajaan negeri Palembang itu, terlalu banyak fasal ia berganti-ganti menjadi raja diatas tahta kerajaan memerintah didalam negeri Palembang. Adakalanya dengan aturan betul diganti anaknya menjadi raja dan adakalanya dengan sebab perang dan adakalanya daripada sebab wasiat, yakni pesan. /Tatkala masanya raja lagi hidup, berwasiat kepada sekalian punggawa menteri dan orang besar-besar sekalian dengan sumpah: “Jikalau aku mati, sianu yang akan mengganti aku; tiada aku sukai anaku mengganti akan menjadi raja”. Demikianlah yang dikerjakan oleh segala punggawa menterii dan sekalian orang didalam negeri Palembang sepertimana yang wasiat itu juga. Dan adakalanya dengan sebab berperang dengan orang putih, yaitu Holanda. Dan apabila alah daripada perang itu, Raja Palembang undur di hulu, tiada lagi mau ilir di Palembang, menyuruh saudaranya menjadi ganti jadi raja diatas tahta didalam negeri Palembang menahan bicara orang Putih”.*<sup>18</sup>

Berdasarkan naskah yang ditulis antara tahun 1863 – 1880 (*Ibid.*; 49) tersebut dapat diketahui bahwa proses pergantian raja di kerajaan Palembang Darussalam bisa bermacam-macam, namun satu hal yang harus dicatat adalah kalimat “*Adakalanya dengan aturan betul diganti anaknya menjadi raja*”. Kalimat ini menegaskan adanya semacam aturan baku tentang proses pergantian raja yang

dianggap sah dan mempunyai legitimasi yang kuat, yaitu bahwa penggantinya adalah anak raja yang memerintah sebelumnya. Meskipun dalam kalimat tersebut tidak menyebutkan anak raja yang mana yang berhak menggantikan raja sebelumnya, namun dari naskah itu juga dapat diketahui bahwa sebelum raja yang berkuasa turun tahta atau meninggal dunia, terlebih dahulu mengangkat putra mahkota dan diberi gelar Pangeran Ratu. Gelar putra mahkota ini pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Husin Diauddin bergelar Prabu Anom, karena gelar Pangeran Ratu sudah digunakan oleh putra mahkota yang diangkat oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Di sisi lain, dari penggalan kalimat dalam naskah tersebut dapat dipastikan bahwa raja yang berkuasa sebelumnya punya otoritas yang tinggi untuk menetapkan penggantinya, meskipun lewat pesan atau surat yang berbentuk wasiat.

Hasil musyawarah adat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2003 di Auditorium IAIN Raden Fatah Palembang, yang menginginkan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penetapan syarat kesulthan Palembang Darussalam untuk kepentingan sejarah. Maka musyawarah adat kemudian menyusun suatu rancangan yang berisi pedoman atau syarat-syarat menjadi sultan. Adapun isi pedoman atau persyaratan-persyaratan sebagai sultan Palembang adalah sebagai berikut (Siregar, 2004: 73-74): *pertama*, beragama Islam, termasuk keluarganya. *Kedua*, dari zuriat Kesultanan Palembang Darussalam (diutamakan dari zuriat Sultan Mahmud Badaruddin II). *Ketiga*, mempunyai bukti Amanah (berupa benda-benda peninggalan dari sultan-sultan Palembang Darussalam). *Keempat*, dikenal oleh masyarakat Palembang dan kesultanan lainnya. *Kelima*, dapat mendorong semangat kesatuan dan persatuan masyarakat Palembang Darussalam. *Keenam*, peduli terhadap peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. *Ketujuh*, tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap pengrusakan atau penjualan aset-aset peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. *Kedelapan*, berani berkorban untuk kemajuan dan kebanggaan zuriat. *Kesembilan*, bertempat tinggal di Palembang, mengenal negeri Palembang. *Kesepuluh*, berpendidikan yang tinggi minimal SMA. *Kesebelas*, berpengalaman dalam berorganisasi.

Djohan Hanafiah salah satu tokoh Pemerhati Sejarah dan Budayawan Palembang justru memberikan persyaratan yang berbeda. Ia mengemukakan bahwa kriteria menjadi sultan adalah genealogi, geografis, simbol-simbol kerajaan dan pengakuan dari masyarakat.<sup>19</sup> Dengan mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Mustofa Al-Azhari, seorang ulama Palembang, Rahmawati Siregar menyebutkan bahwa untuk menentukan seseorang berhak menjadi sultan,

tidak hanya dilihat dari faktor genealogi, wilayah, kekuasaan dan pengakuan masyarakat saja, melainkan juga harus dilihat dari segi kepemilikan pesan-pesan khusus dari para leluhur. Artinya yang menjadi sultan adalah orang pilihan dari leluhur. Dan juga didukung oleh legitimasi informal diperoleh seseorang karena kapasitasnya dalam sesuatu bidang dianggap mumpuni oleh masyarakat, misalnya “kyai” untuk ulama. Legitimasi informal ini bisa dilihat dari penerimaan masyarakat sekitar pada yang bersangkutan secara luas dan tanpa pamrih.

Berdasarkan paparan mengenai konsep Negara dan kedudukan raja di atas kaitannya dengan proses penggantian kekuasaan, maka dapat dijelaskan bahwa secara garis besar ada tiga unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang sultan agar kekuasaannya mempunyai legitimasi dan kredibilitas, yaitu genealogis, geografis dan simbol-simbol atau tanda-tanda kebesaran kerajaan (Regalia) yang biasanya merupakan warisan dari para pendahulunya. Tanpa ketiga unsur tersebut legitimasi kedudukan seorang raja menjadi lemah dan rawan pemberontakan.

### **Analisis Sosiologis Terhadap Pergantian Sultan**

Setelah kejatuhan kerajaan Sriwijaya wilayah Palembang mengalami kekosongan pemerintahan selama kurang lebih seratus tahun. Pemerintahan baru muncul pada abad ke enam belas . Ki Gede Ing Suro dianggap sebagai pendiri Kerajaan Palembang yang berkuasa pada abad enambelas. Menurut Wolders (1975) Ki Gede Ing Suro menduduki jabatan sebagai Raja di Palembang yang kemudian disusul dengan Gending Iilir. Ki Gede Ing Suro memerintah di Kerajaan Palembang selama 2 tahun. Raja Ki Gede Ing Suro kemudian digantikan oleh saudaranya Gending Iilir yang berkuasa selama 1 Tahun dan seterusnya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Gelar sulthan yang digunakan oleh penguasa menandakan bahwa rajanya beragama Islam. Pada awal abad 16 ketika bangsa Eropa hadir di wilayah Palembang mereka berusaha keras untuk mendapatkan komoditi perdagangan secara langsung dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang besar. Disinilah Pengaruh bangsa Eropa terhadap eksistensi seorang Raja, KI Gede, atau Sultan yang tidak saja pengakuan dari kulturnya saja tetapi juga dari kultur keyakinannya. Bangsa Eropa telah berhasil menjadikan Raja yang beragama Islam menambah gelar Sultan, ini dilakukan untuk penguatan kekuasaan dan hukum terhadap penguasa pribumi. Mereka dianugrahi bermacam-macam tanda kebesaran sebagai suatu simbol kekuasaan. Akibatnya di dalam kesultanan Palembang

sendiri timbl persaingan antara anggota keluarga raja dan sultan yang ingin berkuasa juga.

Dari sini dapat dilihat bahwa pergantian kekuasaan pada saat Kerajaan Palembang berjalan seperti umumnya terjadi di beberapa Kerajaan di Jawa beraliran Hindu-Buddha yakni geneologi dan martabat. Hal ini juga berlaku dalam membaca proses suksesi kepemimpinan di masa lalu, saat kesatuan politik masih berbentuk kerajaan atau kesultanan, yang di beberapa daerah di nusantara masih terus berlanjut sampai saat ini. Apalagi jika dilihat bahwa pengangkatan seorang raja (sultan) tidak terlepas dari konsep Negara (kekuasaan), yang tentu saja berbeda dengan konsep negara modern yang diperkenalkan oleh Barat.

Sebab Raja atau Sulthan merupakan tipe kepemimpinan yang menduduki lokasi sosial-historis dengan orientasi nilai yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula reaksinya terhadap eksistensinya apakah berupa penolakan, adaptasi, dan asimilasi. Tidak jarang menghadirkan konflik politik yang disebabkan oleh faktor sosiokultural dengan kepentingan ideologi atau nilai tertentu. Tidak kalah pentingnya analisis struktural yang membahas status dan peranan perbagai elite, hubungan dan perbandingan kekuasaan antara mereka, kesemuanya dalam kerangka hirarkis suatu sistem feodal.

Struktur kekuasaan sangat menentukan struktur sosial dengan kedudukan birokrasi yang sangat sentral fungsinya. Dalam hubungan ini sangatlah relevan menelaah kehidupan sosial antara golongan sosial, terutama dalam konteks kepentingan, status sosial, ideologi, serta sistem nilai-nilainya. Tidak dapat diabaikan kenyataan bahwa tindakan dan interaksi politik tidak dapat berjalan di luar kerangka kebudayaan politik (*political culture*).

Di sini tindakan, kelakuan, serta sikap perlu dilembagakan. Misalnya peranan seorang tokoh ditentukan oleh struktur masyarakat, atau paling tidak peranannya dijalankan dalam batas-batas struktural masyarakat. Pelaku tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari ikatan atau subjektivitas yang demikian.

Apa yang terjadi pada sistem pergantian kekuasaan di Kesulthanan Palembang Darussalam merupakan suatu perjumpaan berbagai nilai, kepentingan dan kultur, dimanan konsep kepemimpinan didasarkan pada otoritas tradisional yang didasarkan pada pengakuan kultural. Tipe ini memudahkan dalam mempengaruhi masyarakat, karenanya kepemimpinan tradisional tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan *berbasis genealogic-hereditically* (keturunan) dan kharismatik.

Namun, diantara dua tipologi basis kepemimpinan ini, maka kepemimpinan berbasis kharismatik merupakan pelatak dasar setiap kepemimpinan tradisional di berbagai entitas sosial. Konsep Weber tentang kharismatik ini merupakan pembahasan argumentatif-komparatif yaitu pengalaman masyarakat keagamaan di dunia. Pada abad Tengah di Eropa Barat yang dimulai pada abad ke-13, hingga menjelang revolusi industri, ternyata para pendeta sangat mempunyai kewibawaan dalam agama, sosial, politik, ekonomi, sehingga membentuk nilai kharisma.

Di Indonesia pada abad ke-19, kharisma tokoh-tokoh Islam yaitu para kiai menduduki kepemimpinan yang kharismatik. Terlepas dari latar belakang apapun yang mendasari penetapan syarat sebagai sultan adalah keturunan (zuriat) Kesultanan Palembang, secara tradisi ini dapat dibenarkan. Bagaimanapun faktor keturunan atau genealogis menjadi salah satu penentu legalitas dan kedaulatan suatu kesatuan politik di masa lalu. Raja dipandang sebagai pusat Kosmos dan dari raja terpancar kekuatan yang berpengaruh pada alam maupun masyarakat. Penempatan raja sebagai keturunan nabi-nabi dan dewa-dewa dimaksudkan untuk memperkokoh keabsahan (*legitimacy*) sebagai raja. Anggapan ini dikaitkan dengan kepercayaan magis dari wahyu raja (*pulung ratu*) dan konsep tentang garis keturunan darah raja (*trahing kusuma rembesing madu*). Di kalangan masyarakat Jawa terdapat anggapan, bahwa hanya orang yang masih mempunyai darah rajalah yang dapat menjadi raja.

Konsep seperti ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru, karena dalam konsep kekuasaan raja di Jawa, misalnya (dan Asia Tenggara umumnya), kedudukan raja paling sering diabsahkan (juga) dengan membuktikan kesinambungan. Hubungan darah atau pengalaman yang serupa dengan seorang tokoh pendahulu yang agung memungkinkan seseorang ikut tersinari oleh *aura* (sinar) keagungan. Bukan itu saja, justru hal terpenting dari penelusuran genealogi ini adalah bisa menjadikannya mata rantai kesinambungan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa proses pengangkatan raja-raja atau sultan-sultan yang pernah memerintah di Palembang tidaklah berbeda dengan yang ada di kesultanan-kesultanan lain yang pernah ada di bumi nusantara ini. Meskipun kesatuan politik ini bernafaskan Islam, namun sesungguhnya masih meneruskan apa yang telah ada pada masa sebelumnya, yaitu Konsep Hindu-Budha, sementara Islam terkadang muncul dalam aspek sosio dan politik. Hal yang sama juga berlaku untuk aspek-aspek legalitasnya. Selain kedua aspek di atas, yaitu legalitas dan simbolisasi, yang paling penting adalah struktur

organisasi yang “dipimpin” oleh seorang Sultan. Hal ini mengingat gelar “sultan” bisa mengacu kepada seseorang yang menyatukan pelaksanaan kekuasaan tertinggi dan berbagai lambing yang bersifat magis dan mistis, yang menyatukan kualitas perlengkapan-perengkapan kekuasaan itu.<sup>20</sup>

Jadi munculnya dua sultan di kesultanan Palembang merupakan fenomena yang tidak biasa dilepaskan dari apa yang disebut sebagai status, powershif dan legitimasi. Meskipun baik sultan prabu diraya, maupun sultan iskandar badaruddin dijadikan sebagai sultan hanya sebatas simbolisasi kebudayaan dan kedigijayaan kesultanan Palembang Darussalam. Namun tetap saja posisi sultan pada level symbol kebudayaan memiliki pengaruh yang kuat khususnya bagi masyarakat asli Palembang. Sebab sebagai symbol kebudayaan, maka seorang sultan mampu memainkan beberapa peranan strategis yakni sebagai aktor dari sistem kebudayaan, system social dan system personal. Seorang sultan memiliki kemampuan leadership sebab ia juga berperan sebagai pusat sosialisasi dan sekaligus evaluasi nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya.

### **Kesimpulan**

Uraian mengenai analisis sosiologis terhadap sistem pergantian sultan di Palembang, dapat disimpulkan bahwa persoalan dualisme pengangkatan sultan di kesultanan Palembang pada era modern tidak sekedar persoalan simbol-simbol kebudayaan, penyatuan pemeliharaan warisan kesultanan dan persoalan perebutan pengaruh tetapi ada hal lain yang ditemukan berupa persoalan yang terkait dengan stratifikasi sosial kedua belah pihak. Hal ini terlihat dalam komunitas tersebut ada strata tinggi, strata sedang dan strata rendah. Pembedaan dan/atau pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol -simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai-baik berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya maupun dimensi lainnya

Dalam suatu kelompok sosial (komunitas). Simbol -simbol tersebut misalnya, kekayaan, pendidikan, jabatan, kesalehan dalam beragama, dan pekerjaan. Dengan kata lain, selama dalam suatu kelompok sosial (komunitas) ada sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai, dan dalam suatu kelompok sosial (komunitas) pasti ada sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai. ini terrekam didalam persyaratan menjadi sultan yang lain satu sama lainnya.

## Endnote

---

- <sup>1</sup> Lihat Berg, 1902: 10; Uka, 1993: 297; dan Taufik Abdullah, 2002
- <sup>2</sup> A. Sartono. Kartodirdjo, “Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisionil dan Kolonial”, *Lembaran Sedjarah, No.4*, (Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. 1969), hlm. 298
- <sup>3</sup> Fachri Ali, Refleksi “Paham Kekuasaan Jawa” *Dalam Indonesia Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 32
- <sup>4</sup> Lihat Faille, 1971, hlm. 14; Rahim, 1998, hlm. 80; dan Retno, 2004
- <sup>5</sup> Lihat Retno, 2002
- <sup>6</sup> Lihat Michiel Otto Woelders, *Het Sultanaat Palembang 1811 – 1825*, 1975
- <sup>7</sup> Lihat Rahim, 1998
- <sup>8</sup> Lihat Woelders, *Het Sultanaat Palembang 1811 – 1825*, 1975
- <sup>9</sup> Lihat Graff dan Pigeaud, 2001, hlm. 337
- <sup>10</sup> Lihat Faille, 1971, hlm. 14
- <sup>11</sup> Lihat Rahim, 1998, hlm. 73
- <sup>12</sup> Lihat Rahim, 1998, hlm. 74
- <sup>13</sup> Anonim, *Sultan Mahmud Badaruddin II*. (Palembang: Badan Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Madya Palembang, 1984), hlm. 29-30
- <sup>14</sup> Lihat Rahim, 1988, hlm. 80
- <sup>15</sup> Lihat Rahim, 1988, hlm. 81-82
- <sup>16</sup> Lihat Retno, 2004, hlm. 34
- <sup>17</sup> Lihat Retno, 2002, hlm. 119
- <sup>18</sup> Lihat Michiel Otto Woelders, *Het Sultanaat Palembang 1811 – 1825*, 1975, hlm. 74
- <sup>19</sup> Lihat Siregar, 2004, hlm. 69
- <sup>20</sup> A. Sartono. Kartodirdjo, “Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisionil ..., *Op.Cit.*, hlm. 13

## Daftar Pustaka

- Anonim. (1984). *Sultan Mahmud Badaruddin II*. Palembang: Badan Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Madya Palembang.
- Fachri, Ali, (1986). Refleksi “Paham Kekuasaan Jawa” *Dalam Indonesia Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Hanafiah, Djohan. (1987). *Kuto Gawang Pergolakan dan Permainan Politik dalam Kelahiran Kesultanan Palembang Darussalam*. Parawisata Jasa Utama.
- Kartodirdjo, A. Sartono. (1969). “Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisionil dan Kolonial”, *Lembaran Sedjarah, No.4*, Seksi Penelitian Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada.